

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN LORONG GARDEN DI KOTA MAKASSAR”**



DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD QADRI SUPRIATNA

E051 171 507

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

2023



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN LORONG GARDEN DI KOTA MAKASSAR"**

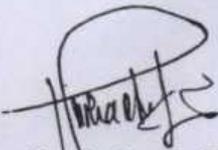
Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD QADRI SUPRIATNA

E051 171 507

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Indar Arifin, M.Si.

NIP. 19630407 198903 2003

Pembimbing II



Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos. M.Si

NIP. 19680411 200012 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001



LEMBAR PENERIMAAN
IMPLEMENTASI KEBJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN LORONG GARDEN DI KOTA MAKASSAR

Disusun oleh:

MUHAMMAD QADRI SUPRIATNA

E051171507

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unuversitas Hasanuddin
Makassar, 2023

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Indar Arifin, M.Si

Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

(
(
(
(
(

Pembimbing Utama : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. Suhardiman Samsu, S.Sos M.Si

(
(



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD QADRI SUPRIATNA

NIM : E051171507

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN LORONG GARDEN DI KOTA MAKASSAR"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD QADRI SUPRIATNA



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN LORONG GARDEN DI KOTA MAKASSAR**”. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penelitian akan menyampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini di karenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk orang tua saya ibu Atitha Kuba dan ibu Agus Tuning Tyas dan Bapak Rudi Supriatna yang telah memberi dukungan , motivasi doa serta kasih sayang yang henti- hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai Pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta kakak saya Atika Surya Aisyah dan adik-adik saya Muh. Hasbih Supriatna dan Keyzanti Putri yang memberi doa dan semangat dalam melakukan Pendidikan selanjutnya, kepada Dr. Indar Arifin, M.Si pembimbing I dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan



skripsi ini. Semoga skripsi dapat berkontribusi dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah kota dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.



8. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Teman-teaman rumah Art Space di mana saya bisa mengenal Profesional dalam dunia kerja.
10. Seluruh tim kerja di PT.Sari Coffee Indonesia (Starbucks) yang selalu memberi semangat saya untuk segera menyelesaikan program studi saya terutama Suradi gaffar, Muh.Arham, Muh.Nur Artha, Sri Wahyuni, Aringga Lazuardi, Iskandar Zukarnain, Syahrul Jamal, Celia amanda yakob, dan Evan quentin kaperek.
11. Dewi Ardy salah satu customer saya yang mengingatkan untuk segera menyelasai Pendidikan saya.
12. Seluruh teman-teman organisasi Himapem dan sodek yang telah ikut andil dalam perjalanan saya di dunia kampus.
13. Seluruh tim Creative space Rahmat Febianto, Tungki Ariwibowo, Azmin Amir, Samsul Aru W, dan diki.
14. Sahabat-sahabat saya Imran s, saya andi farasakti Mirdin, Andi Irsan T, Andi Akmal, Muh. Khafi, Saiful Jufri, Galang Ramadan, Appet dan masih banya lagi.
15. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu kelancaran dan keberhasilan penyusunan Skripsi ini.

14 Desember 2023

Muhammad Qadri Supriatna

E051171507



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	21
1.4 Manfaat Penelitian	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	23
2.2 Pengertian Pemerintah	32
2.3 Pengertian Pemerintah Daerah	33
2.4 Konsep Lorong Garden (LONGGAR).....	34
2.5 Konsep Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR)	35
2.6 Kerangka pikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Informan Penelitian	39
3.4 Sumber Dan Jenis Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	40
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	44
1.2 Profil Kecamatan Rappocini.....	47



4.1.3	Gambaran Umum Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar	50
4.2	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	57
4.1.2	Faktor-faktor yang mempengaruhi	64
BAB V	75
KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Di Kota Makassar Tahun 2021.....	46
Tabel 2. Jumlah RT/RW di lingkungan Kecamatan Rappocini Tahun 2021.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini.....	48
--	----



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Muhammad Qadri Supriatna, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the title: Implementation of Regional Government Policy in the Implementation of Lorong Garden in Makassar City (Supervised by Dr. Indar Arifin, M.Si and Dr. Suhadirman Syamsu, S. Sos., M.Si).

This research discusses and analyzes how Lorong Garden is implemented in Makassar City and the factors that influence its implementation. This research was carried out with the aim of finding out the role of the Makassar City government and related agencies in implementing garden alleys in Makassar City, especially Rappocini District, and to find out the factors that influence its implementation, both supporting and inhibiting factors.

The type of research used is qualitative descriptive research, namely describing data in accordance with the facts and problems being studied. This research then provides a clear picture of the role of the Makassar city government together with related agencies in implementing garden alleys and the factors that influence its implementation. Data collection for this research used interview techniques, literature study and documentation study.

The results of this research show that the beauty and cleanliness indicators in this program have not yet been achieved, because there are still hallways that are beautiful but not clean and vice versa or even neither. The factors that influence the implementation of this garden alley consist of supporting factors, namely cooperation between the government, CRS and the community and inhibiting factors, namely communication. Human resources and lack of empowerment.

Keywords: Regional Government, Policy Implementation, Lorong Garden



ABSTRAK

Muhammad Qadri Supriatna, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Lorong Garden Di Kota Makassar (Dibimbing Oleh Dr. Indar Arifin, M.Si dan Dr. Suhadirman Syamsu, S. Sos., M.Si).

Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Lorong garden di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah kota makassar dan dinas terkait dalam pengimplementasian lorong garden di Kota Makassar khususnya Kecamatan Rappocini serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat..

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang sesuai dengan fakta dan masalah yang diteliti. Penelitian ini kemudian memberikan gambaran secara jelas tentang peranan pemerintah kota makassar bersama dinas terkait dalam pengimplementasian lorong garden dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indikator Keindahan dan kebersihan pada program ini masih belum bisa dicapai, sebab masih ada lorong yang indah tapi tidak bersih begitupun sebaliknya atau bahkan tidak keduanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan lorong garden ini terdiri dari faktor pendukung yaitu kerjasama pemerintah, CRS dan masyarakat serta faktor penghambatnya yaitu komunikasi. Sumber daya manusia serta kurangnya pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Implementasi Kebijakan, Lorong Garden



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah negara, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dari masa ke masa. Sistem pemerintahan merupakan suatu tatanan atau tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan dan fungsi dari pemerintahan. Sebelum masa reformasi Indonesia menganut konsep sentralisasi, yang mana segala kekuasaan dan kewenangan berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana, sehingga menimbulkan berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah terkhusus dibidang pembangunan. Karena hal inilah pada masa reformasi lahirlah konsep desentralisasi.

Lahirnya konsep desentralisasi di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak populer lagi dikarenakan dinilai tidak mampu memahami dan memberikan penilaian yang tepat atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang di daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, desentralisasi adalah untuk memperkuat persatuan nasional. Karenanya dapat

keberadaan sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem NKRI tidak



dipandang bersifat dikotomis, melainkan kontinum dan hal tersebut termasuk dengan kebijakan publik (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2007).

Kebijakan publik yang dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik merupakan sesuatu yang krusial untuk dipelajari dengan alasan: Pertama, untuk melihat sejauh mana isi kebijakan publik mampu memuat nilai-nilai dan kepentingan publik khususnya kelompok sasaran. Kedua, untuk mengkritisi formulasi kebijakan publik yang menyangkut: (a) apakah kebijakan tersebut ditetapkan secara demokratis, transparan, dan akuntabel; dan (b) bagaimana peran aktor dan stakeholder dalam formulasi kebijakan. Ketiga, mengidentifikasi apa dampak dari sesuatu kebijakan publik bagi individu, komunitas, dan masyarakat serta pemerintah (AG. Subarsono, 2010).

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan dibidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/Walikota (3).

Begitupun dengan yang ada di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan konteks sosial budayanya. Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja yang sesuai

1 masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 kemudian direvisi kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun



2015 yang selanjutnya diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 menegaskan urusan wajib pemerintah daerah meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial menjadi tanggungjawab daerah yang harus mengurusinya.

Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan pun tak luput dari berbagai masalah, mulai dari kemiskinan karena kurangnya keterampilan, kebersihan karena kurangnya kesadaran serta keamanan dan masih banyak lagi. Dalam menciptakan kota bersih, aman, nyaman, terampil dan sejahtera. Walikota Makassar telah memperkenalkan istilah Lihat Sampah Ambil (LISA), Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR), Lorong Garden (LONGGAR) dan Sombere and Smart City Makassar yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih. Dalam implementasinya, program-program pemerintah kota Makassar di pemerintahan Danny Pomanto begitu kaya akan jargon. Misalnya saja, Sombere and Smart City Makassar, LISA (lihat sampah ambil), termasuk Lorong Garden atau Makassar Tidak Rantasa (MTR) dan berbagai banjir jargon lainnya, yang semoga tidak hanya berhenti pada kata-kata, namun bisa berjalan dan memiliki bukti langsung dan terasa manfaatnya bagi publik.

Lorong Garden adalah sebuah program Pemerintah Kota Makassar, yang inisiatifnya dari masyarakat tetapi dikembangkan Pemkot setempat. Program ini selain dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lorong-lorong di Kota Makassar. Lorong yang biasanya kumuh jadi sumber penyakit sosial, ingin diubah menjadi lorong yang asri, sejuk, ditargetkan menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Lorong yang



ada ditata agar lebih indah, bersih dan hijau Untuk menunjang program tersebut, pemerintah berupaya membuat Badan Usaha Lorong yang nantinya tanaman hasil dari lorong garden tersebut dapat dijual di badan usaha tersebut. Dengan program ini maka diharapkan lorong-lorong yang ada menjadi lebih produktif, bersih dan tertata indah.

Berfokus pada program Lorong Garden, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto mengatakan, Lorong adalah ibarat sel kota dan otaknya adalah pemerintah. "Sel dan otak menjadi penentu apakah kota itu bisa terus hidup, sehat atau bahkan mati. Pemerintah Kota Makassar, kata Danny, salah satu hal yang akan dijalankan pemerintahannya adalah melakukan restorasi tata ruang Kota Makassar menjadi berstandar dunia. Karena itu ia melihat perlunya melakukan restorasi atas lorong. Banyak persoalan sosial yang ada di Lorong. Mulai dari masalah begal motor, orang-orang yang derajat kesehatannya rendah, hingga banyak masyarakat miskin yang tinggal di lorong. "Maka pendekatan kita bukan komunitas, tetapi pendekatan ruang yang di dalamnya multikomunitas, jelas dia. Dijelaskannya, Lorong Garden akan dikembangkan dengan melakukan penanaman cabai. Diharapkan ini akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi masyarakat yang tinggal di lorong" (4).

Program Lorong Garden (LONGGAR) ini diinisiasi oleh Walikota Makassar yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Makassar Tahun 2014 – 2019, dan merupakan bagian dari program utama Walikota Makassar, yaitu GEMAR MTR (Gerakan Makassar Tidak Rantasa). Launching program ini dilakukan pada tahun 2015 dan secara terus menerus dilaksanakan setiap tahunnya. Program LONGGAR tentunya tidak hanya mengubah wajah lorong-lorong di Kota Makassar yang kotor dan gersang menjadi bersih dan hijau, tetapi juga dapat meningkatkan gerak ekonomi masyarakat. Melalui "Urban Farming" lorong-lorong kota



dipenuhi dengan kebun-kebun vertical yang ditanami tanaman produktif seperti sayur-sayuran dan buah, serta tanaman hias. Saat panen, dapat dikonsumsi oleh warga dan juga dapat dijual. hijau dan Produktif menjadi warna lorong-lorong kota.

Desain pelaksanaan program ini menggunakan tiga pendekatan yaitu Jargon, Kegiatan dan Pelibatan Elemen Pendukung. Jargon dari Gemar MTR terdiri atas LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong),

MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa. LISA bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat agar setiap kali melihat sampah di sekitar agar segera memungut sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. MABELO bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat yang tinggal di lorong-lorong Kota Makassar untuk menjaga kebersihan lingkungan lorong. MABASA ditujukan agar masyarakat Makassar tidak suka membuang sampah di sembarang tempat. Sedangkan Aku dan Sekolahku Tidak Rantasa ditujukan untuk para murid/siswa yang berada di lingkungan sekolah agar selalu hidup bersih dan tidak suka membuang sampah di sembarang tempat.

Program LONGGAR (Lorong Garden) merupakan program yang memanfaatkan lorong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada di tata agar lebih indah, bersih dan hijau dengan tanaman sayur-sayuran dan buah serta lainnya. Selanjutnya kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungan sekitar dirinya. Kerja bakti dibagi atas tiga yaitu Jumat Bersih, Sabtu Bersih dan Minggu Bersih. Kegiatan kerja bakti ini berlaku untuk semua elemen masyarakat baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat di lingkungan sekitar.



Program Lorong Garden merupakan Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Lorong Garden

(LONGGAR) yang mengatur tentang tata kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar berbasis lorong untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal bersih lingkungan sekitar maupun bersih dalam berperilaku.

Sasaran program ini adalah meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan Lorong dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah, sehingga melahirkan program yaitu Makassar Ta Tidak Rantasa telah melaksanakan program Gemar MTR ini dan sebagai turunan melahirkan program Lorong Garden. Indikator keberhasilan program ini adalah Masyarakat Kota Makassar merasa puas terhadap pengelolaan sampah dan pembenahan lorong ditingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah kecamatan dan kelurahan se- Kota Makassar. Saat ini, jumlah lorong yang ada di Makassar mencapai 7.295 lorong yang tersebar di 15 kecamatan, dan 153 kelurahan. Lorong Garden dikembangkan menjadi lorong produktif yang menghasilkan beragam tanaman bernilai ekonomis contohnya cabai. Harapan dari Pemerintah Kota terhadap kegiatan LONGGAR adalah untuk menjadikan Kota Makassar bersih tidak hanya di jalan-jalan umum tetapi juga di lorong-lorong jalan. Karena pada umumnya dikota-kota lainnya saat kita melihat jalan protokol itu sangat bersih tetapi ketika memasuki lorong di suatu daerah maka akan terlihat sampah yang berserakan.



Pelaksanaan program Lorong Garden ini dianggap masih kurang optimal, dilihat dari masih ada lorong di Kota Makassar yang tidak sesuai dengan cita-cita program Lorong Garden yakni kebersihan dan Keindahan. Masyarakat masih belum bisa disadarkan dengan kebersihan lingkungan lorong apalagi hanya sebatas jargon atau slogan saja. Lorong Garden ini memberi kesan bahwa hanya lorong tertentu saja yang di perindah dan dilakukan pembenahan lorong. Sebab lorong lainnya belum juga diperlakukan hal yang sama dengan sasaran Program lorong garden hingga periode kedua Walikota Makassar ini, Belum lagi kita membahas persoalan sampah di Kota Makassar, setiap orang di Kota Makassar menghasilkan sampah rata-rata 0,6 kg/hari. Jika dihitung secara menyeluruh dengan jumlah penduduk kota Makassar sekitaran 1,5 juta maka menghasilkan 1.100 ton sampah/hari dan di buang tempat pembuangan akhir Antang (5). Dari permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan berfokus pada bagaimana sebuah model pengelolaan lorong di Kota Makassar sebagai bentuk inovasi daerah yakni Lorong Garden (LONGGAR) untuk menjadi program penataan lorong yang bersih dan indah dengan berbasis kerjasama masyarakat lorong dan Pemerintah Kota Makassar dan berfokus pelaksanaan lorong garden pada kecamatan Rappocini.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis merasa perlu dan penting dalam melakukan penelitian terhadap **"IMPLEMENTASI PROGRAM LORONG GARDEN (LONGGAR) DI KOTA MAKASSAR"**

1.2 Rumusan Masalah

Adanya Program Lorong Garden diharap bisa menata lorong dan mengubah stigma



rsih dan indah. Sehingga kehidupan masyarakat di lorong turut berubah. arakat lorong dan Pemerintah Kota Makassar yang harus diperkuat, agar

program LONGGAR ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa mengubah wajah lorong awalnya kumuh dan kotor diubah menjadi bersih dan indah dengan adanya program Lorong Garden (LONGGAR).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian, yakni :

1. Bagaimana implementasi program lorong garden di Kota Makassar ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program lorong garden di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Lorong Garden di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Lorong Garden di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Dari segi akademis, penelitian ini akan menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan dalam proses pelaksanaan program pemerintah, dalam hal ini di bidang inovasi program pemerintahan berupa Program Lorong Garden (LONGGAR) di Kota Makassar.



2. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian- penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji tentang inovasi program pemerintah.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai inovasi program Pemerintah yakni Lorong Garden.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan. Implementasi adalah sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Tentu berbeda dengan konsep seperti governance yang menawarkan sejumlah prinsip, meskipun prinsip tersebut sebenarnya sudah umum diketahui terkait dengan paradigma pemikiran tentangan tata kelola pemerintahan yang dianggap efektif dan efisien, yang bersih, transparan dan ebagainya.



Implementasi sebagai sebuah konsep telah ada jauh sebelum konsep good governance yang demikian populer di awal awal tahun 2000-an pasca merebaknya gelombang demokratisasi di berbagai penjuru dunia. Implementasi sebagai konsep adalah sebuah konstruksi pemikiran yang netral, dalam arti tidak merujuk secara khusus pada model sistem politik dan pemerintahan tertentu. Konsep implementasi kebijakan berusaha menjelaskan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya konsep implementasi kebijakan itu berusaha menerangkan secara rinci terkait sejumlah faktor pengaruh, meskipun di dalamnya juga diuraikan sejumlah kondisi yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan itu bisa berjalan efektif dan efisien.

Tidak seperti konsep good governance yang secara eksplisit merujuk pada sistem politik dan pemerintahan tertentu dengan menawarkan sejumlah prinsip agar sebuah tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik. Good governance jelas merujuk atau dianggap lebih kompatibel dengan negara demokrasi, sistem yang terbuka dan demokratis dan sebagainya. Sementara itu konsep implementasi tidak secara spesifik menyoroti sistem politik dan pemerintahan yang ada, melainkan hanya menempatkannya sebagai konteks kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Tidak mengherankan jika dalam beberapa kajian implementasi kebijakan ada sejumlah keberhasilan yang bisa diraih di lingkungan sistem politik yang berbeda beda.

Konsep implementasi sejak awal berusaha netral atau tidak bias pada model dan sistem politik atau pemerintahan tertentu, meskipun sistem tersebut dalam praktiknya bisa berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Konsep implementasi hanya berusaha



ada sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi. Bisa jadi dalam kondisi tertentu, keberadaan sistem politik dan pemerintahan yang

cenderung otoriter atau tertutup dan sentralistik mungkin memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi, bahkan mungkin melebihi apa yang bisa dilakukan negara demokrasi. Sementara itu dalam perspektif dan kondisi tertentu yang terjadi adalah fenomena sebaliknya. Konsep implementasi hanya berusaha mengkaji dan menjelaskan mengapa suatu kebijakan bisa berjalan efektif atau sebaliknya dianggap gagal dalam mencapai tujuan atau misinya.

Indonesia adalah salah satu contoh menarik terkait implementasi kebijakan di mana masing-masing rezim dan sistem politik yang dianut memiliki sejumlah kisah sukses dalam mengimplementasikan kebijakan. Baik rezim yang dianggap sentralistik dan otoritarian atau rezim dan sistem politik yang demokratis dan terbuka seperti sekarang ini memiliki sejumlah catatan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. Di sisi lain, tentu saja ada banyak sejumlah kegagalan dan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan. Semua fenomena tersebut menjadi kajian yang menarik jika mengacu konsep implementasi kebijakan.

Konsep implementasi kebijakan telah lama ada dan tergolong lebih 'tua' dibandingkan konsep good governance. Keberadaannya telah banyak digunakan sebagai pisau analisis oleh sejumlah ahli dalam melihat proses pelaksanaan kebijakan publik dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena eksistensinya yang lebih dulu ada dibandingkan dengan konsep good governance, maka ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan di era Orde Baru misalnya tidak dikaitkan dengan sejumlah prinsip good governance. Sementara itu di era sekarang ini keberadaan konsep implementasi menjadi



g melengkapi dengan konsep good governance dalam melihat kinerja dan jakan publik.

Implementasi sebagai sebuah konsep merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan yang berusaha mengemukakan sejumlah faktor pengaruh dan kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dalam perspektif aktivitas implementasi kebijakan Jones (1994: 20), menyampaikan bahwa tiga macam aktivitas utama, antara lain :

1. Organization; The Establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect.
2. Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.
3. Applications; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instrument.

Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara



pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Implementasi kebijakan sangat penting diperhatikan, karena kebijakan akan tetap menjadi impian atau cetak biru jika tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Udoji (1981) dalam Abdul Wahab (1997: 59) dengan tegas mengatakan bahwa :“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blueprints file jackets unless they are implemented.”

Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Secara konsepsional, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro). Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.



Pastinya tidak akan mudah mengimplementasikan kebijakan karena implementasi itu bukan sekedar melaksanakan apa yang telah digariskan. Ada sejumlah ukuran keberhasilan yang menjadi acuan dan harus diperhatikan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi. Lebih dari itu implementasi harus memberikan hasil dan manfaat, sehingga bukan sekedar bagaimana melaksanakan, tetapi harus dipastikan bahwa tujuan atau sasaran yang menjadi target kebijakan bisa dicapai. Pencapaian tersebut harus ekonomis, efektif dan efisien, memberikan hasil atau outcome dan benefit yang besar. Jelaslah bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang kompleks dan sekaligus penting keberadaannya.

Kompleksitas implementasi kebijakan menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin mengemukakan sebagai berikut :

“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expetations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation fron numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control ” (Ripley, 1986:11).



Dengan mengutip berbagai pendapat para ahli, Winarno (2002: 29) mengemukakan program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program

tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Menurut Wahab (2002: 59) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahwa kebijakan yang bagus secara konseptual dan dirumuskan melalui cara-cara yang demokratis dan melibatkan semua stakeholders hanya akan di atas kertas jika tidak diimplementasikan dengan baik dan dilakukan melalui proses yang benar. Faktanya tidak sedikit kebijakan publik, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya ternyata tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Di antara kebijakan itu ada yang hanya menjadi 'hiasan' dalam dokumen resmi karena tidak diimplementasikan. Bukannya tidak mau mengimplementasikan, tetapi karena ada sejumlah faktor yang mengkondisikan kebijakan yang bagus di atas kertas itu tidak bisa diimplementasikan. Misalnya karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Bisa juga terkendala oleh perubahan sosial politik atau bahkan faktor lingkungan alam.

Semua pendapat terkait implementasi kebijakan itu intinya kurang lebih sama bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks karenanya tidak mudah untuk melakukannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dalam mencapai tujuannya. Termasuk faktor kebijakan itu sendiri terkadang

adalah faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan



karena isi yang terkandung di dalamnya dianggap bermasalah. Andaikan isi kebijakan dianggap sudah bagus, tetapi faktor lain yang berasal dari sisi internal atau eksternal pelaksana kebijakan juga bisa menjadi faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan. Singkatnya banyak faktor krusial yang menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga tahapan implementasi kebijakan seringkali dianggap sebagai tahapan yang paling krusial dan menentukan keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Ruang lingkup implementasi kebijakan itu sangat luas dimensinya sehingga tidak jarang muncul penilaian bahwa sebuah kebijakan yang dianggap gagal dalam mencapai misinya, padahal jelas jelas dalam pelaksanaannya terlihat lancar lancar saja seperti serapan anggaran yang berjalan baik, waktu yang digunakan tidak molor, tidak ada ketentuan yang dilanggar, ada sejumlah wujud barang atau kegiatan yang nyata nyata dilaksanakan atau dilakukan. Tetapi keberhasilan yang demikian ini oleh sebagian orang, khususnya mereka yang menjadi target kebijakan dianggap kurang berhasil atau bahkan gagal. Disebut demikian karena mereka merasa masih sulit dalam menerima atau mendapatkan layanan, masih harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, masih merasa kurang nyaman dan aman dalam melakukannya dan sebagainya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa Faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Policy standard and objective, which 'elaborate on the overall goals of the policy decision..... to provide concrete and more specific standard for assessing performance' (Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada adalah apa yang hendak dicapai oleh perogram atau kebijakan, baik yang



berwujud maupun tidak, jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan);

2. the resources and incentive made available, (sumber daya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelsakan nilai yang efisien);
3. the quality of inter-organizational relationships (we find in their discussion of this, as in so much of the American literature on implemantation, an extensive discussion of aspects of federalism), (komunikasi antarbadan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya sering dilaksanakan rapat-rapat rutin secara berkala dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan, agar dapat mendukung komunikasi organisasi antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan dengan kelompok sasaran yang mampu memahami serta bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan);
4. the characteristics of the implementation agencies, including issues like organizational control but also, going back surely to inter organitizational issues, 'the agency's formal and informal linkages with the "policy-making" or "policy-enforcing" body', (karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung organisasi yang mendapat dukungan dari struktur (sumber daya) organisasi, nilai-



nilai (budaya) yang berkembang dalam organisasi, hubungan dan interaksi komunikasi internal organisasi dalam birokrasi.

5. the economic, social and political environment, (lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri); dan
6. the disposition or response oh the implementers, involving three elements: 'their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response to it (acceptance, neutrality, rejection) and the iuntensity of that response', (sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa besar demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan, beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini).

2.2 Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata "perintah" (*to order*) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.



Pemerintah menurut Sudiranata adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam

rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundangundangan baik tertulis maupun tidak. Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu :

- a. Pemerintah dalam arti luas : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh : Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- b. Pemerintah dalam arti sempit : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif.

2.3 Pengertian Pemerintah Daerah

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah



sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan

penjelasan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4 Konsep Lorong Garden (LONGGAR)

Dalam menciptakan kota bersih, aman, nyama, terampil dan sejahtera saat ini Walikota Makassar telah memperkenalkan istilah Lihat Sampah Ambil (LISA), Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR), Lorong Garden (LONGGAR) dan Sombere and Smart City Makassar yang merupakan suatu program yang di canangkan oleh Walikota Makassar dalam menciptakan Kota Makassar yang bersih.

Walikota Makassar ingin mengubah wajah lorong menjadi hijau dengan program Lorong Garden (Longgar), sesuai dengan visi Walikota merestorasi nasib rakyat. Program Lorong Garden tiada lain memanfaatkan lorong di

sejumlah wilayah kecamatan untuk menjadi lebih produktif yang diupayakan lorong menjadi hijau dan bersih dengan menanam berbagai tanaman seperti sayuran, tomat dan cabai, sehingga meminimalisir penyakit sosial yang ada di lorong-lorong tersebut karena adanya kegiatan keseharian yang positif yang berproduktif serta memperbaiki psikologis masyarakat melalui pandangan yang hijau, asri, aman dan tentram.

Pelaksanaan program LONGGAR (Lorong Garden) merupakan program yang



ong-lorong kota agar lebih produktif. Lorong yang ada di tata agar lebih hijau dengan tanaman sayur-sayuran dan buah serta lainnya. Selanjutnya

kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungan sekitar dirinya. Kerja bakti dibagi atas tiga yaitu Jumat Bersih, Sabtu Bersih dan Minggu Bersih. Kegiatan kerja bakti ini berlaku untuk semua elemen masyarakat baik pemerintah, karyawan swasta maupun masyarakat di lingkungan sekitar.

Program lorong garden (longgar) merupakan salah satu program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penataan dan penghijauan kawasan pemukiman warga di Kota Makassar. Program longgar dinilai dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat Kota Makassar. Menurut Walikota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto program Lorong Garden menjadi tolak ukur apakah masyarakat Kota Makassar hidup dengan sehat atau tidak. Program Longgar merupakan upaya pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki kawasan lorong atau jalan sempit di permukiman kumuh agar menjadi lebih nyaman dan sehat. Program ini diharapkan mampu mengurangi polusi udara, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2.5 Konsep Makassar Ta' Tidak Rantasa' (GEMAR MTR)

Gerakan Masyarakat Makassarta Tidak Rantasa (Gemar MTR) dicanangkan Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdhan Pormanto April 2014. Program ini merupakan wujud nyata, komitmen, dan tingginya kepedulian pemerintah Kota Makassar dalam menjadikan Makassar sebagai Kota dunia yang nyaman dan tidak rantasa". Dalam bahasa daerah Makassar, tidak rantasa memiliki arti tidak jorok, Seperti penamaannya, program ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut semangat segenap warga kota dalam mewujudkan Makassar dua kali lebih baik.



MTR tidak hanya sekedar program. Kegiatan ini justru merupakan wujud nyata dalam mengubah pola pikir dan berperang melawan kejojoran. Gerakan

ini juga dianggap sebagai bagian dari budaya siri" na pacce" yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bugis dan Makassar. Dengan memunculkan siri" (malu) dan menggerakkan hati masyarakat Makassar, program ini diyakini bisa berhasil dalam menjadikan Makassar sebagai kota nyaman yang tidak rantasa" lagi.

Gemar MTR ini adalah gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat kota Makassar, sehingga program ini tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Program Makassar ta" Tidak Rantasa sebagai program yang memberikan harapan akan perubahan perilaku warga Kota Makassar menjadi lebih baik. Kata "rantasa" dalam bahasa Makassar yang bermakna kotor, jorok, tidak indah, tidak baik merupakan sebuah kata yang memiliki arti yang tidak baik apalagi jika predikat tersebut melekat pada manusia. Melalui kata "rantasa" ini pemerintah berpandangan jika tidak ada warganya ingin mendapatkan predikat tersebut sehingga akan senantiasa hidup tidak "rantasa" baik dalam kebersihan lingkungan, pribadi, serta saat berinteraksi. Makassar ta tidak rantasa" adalah program kebersihan kota Makassar dari Pemerintah yang ingin menciptakan Kota Makassar yang bersih terhindar dari sampah-sampah yang berserakan. Gemar MTR memiliki makna yang lebih luas dibandingkan hanya dikatakan sebagai program kebersihan saja.



2.6 Kerangka pikir

